
BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Provinsi Bali memiliki corak perekonomian yang sedikit berbeda dengan provinsi lain di Indonesia. Daya dukung kebudayaan dan kesenian serta panorama dan keindahan alam, sehingga menjadikan Bali sebagai daerah yang memiliki ciri khas tersendiri.

Dua prinsip dasar pembangunan ekonomi Bali yang perlu diperhatikan adalah mengenali potensi wilayah Bali itu sendiri, dan merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro growth, pro job, dan pro poor dengan tidak melupakan konsep Tri Hita Karana sebagai perwujudan dari hubungan Manusia dengan Tuhan, Manusia dengan Manusia, dan Manusia dengan Alam. Terkait dengan itu, beragam potensi unggulan yang dimiliki Provinsi Bali merupakan aset berharga yang perlu digali dan dikembangkan dalam pencapaian pembangunan menuju Bali Mandara (Maju, Aman, Damai dan Sejahtera).

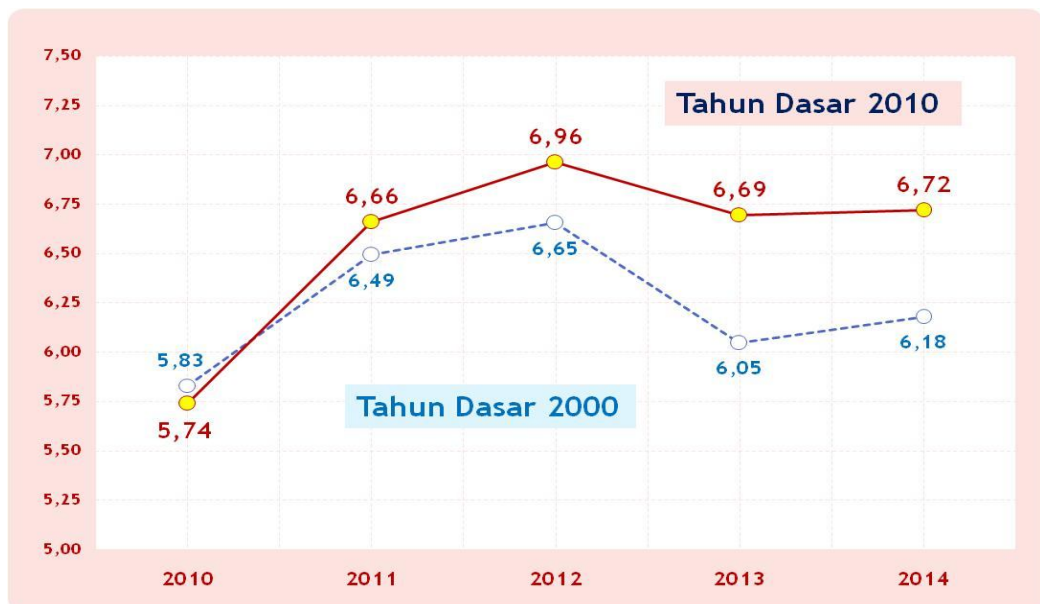
Sebagai upaya perwujudan pembangunan Bali yang Maju, Aman, Damai dan Sejahtera atau menuju “Bali Mandara”, maka keberlanjutan pembangunan di Bali harus ditopang dengan keterpaduan antar tiga pilar, yakni keberlanjutan pembangunan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu, Kebijakan makro ekonomi daerah Bali tahun 2016 tetap diarahkan pada peningkatan pembangunan sosial ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha dengan tetap mengedepankan lingkungan (*pro-environment*) dalam segala aspek pembangunan serta tersebar ke seluruh kabupaten/kota di Bali terutama dengan tingkat kemiskinan yang tinggi sebagai upaya mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah (kabupaten/kota).

Disamping itu juga diupayakan peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dan kontribusi sektor-sektor perekonomian daerah serta peningkatan investasi swasta/swadaya masyarakat sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan kue ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, diharapkan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan. Namun demikian, harus disadari pula bahwa pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjadi acuan keberhasilan pembangunan karena kesejahteraan akan terjadi jika kue ekonomi yang tercipta mampu dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan tahun dasar 2000, ekonomi Bali pada tahun 2014 mengalami pertumbuhan mencapai sebesar 6,18 persen meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 6,05 persen. Namun sesuai dengan cara perhitungan baru bahwa mulai tanggal 5 Februari 2015, perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2010 sehingga ekonomi Bali tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,72 persen. Pertumbuhan ekonomi Bali baik berdasarkan tahun dasar 2000 maupun tahun dasar 2010 tetap berada diatas pertumbuhan secara Nasional yang hanya sekitar 5 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 3.1
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Bali Menurut Tahun Dasar 2000 dan 2010
Tahun 2010-2014



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 3.2
Pertumbuhan Ekonomi Bali di Tingkat Nasional Tahun 2014
Menurut Tahun Dasar 2010

Capaian pertumbuhan ekonomi diatas 6 persen tersebut tentunya merupakan suatu capaian yang mengembirakan, terlebih jika melihat sejumlah tantangan yang ada seperti penurunan ekspor akibat belum stabilnya kondisi ekonomi global, laju inflasi yang cukup tinggi akibat meningkatnya harga BBM bersubsidi serta pengaruh cuaca yang menyebabkan penurunan pada produksi beberapa komoditas pertanian seperti padi.

Selama tahun 2014 kegiatan ekonomi yang terjadi di Bali telah mampu menciptakan total nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp.156,45 Trilyun atau meningkat sebesar 16,41 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 134,40 Trilyun. Sementara Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) total nilai PDRB Bali mencapai sebesar Rp.121,78 Trilyun atau meningkat sebesar 6,72 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp. 114,11 Trilyun.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 3.3
PDRB Provinsi Bali Tahun 2013 – 2014 (Triliun Rupiah)



Dilihat dari sektor kontribusi sektor pembentuk ekonomi Bali, industri pariwisata dalam arti luas masih menjadi penggerak utama (*leading sector*) pertumbuhan ekonomi bali serta telah mendorong terjadinya perubahan struktur ekonomi dari primer ke tersier. Meningkatnya peran industri pariwisata tidak terlepas dari adanya peningkatan jumlah kunjungan wisman sekitar 11,12 persen dari tahun sebelumnya serta ditunjang oleh situasi keamanan yang cukup kondusif di tahun 2014. Pada tahun 2014, kontribusi sektor tersier tampak semakin dominan dimana sektor ini memberikan kontribusi sebesar 66,91 persen. Sementara sektor primer dan sekunder masing-masing memberi kontribusi sebesar 17,37 persen dan 15,72 persen. Pertumbuhan dan distribusi menurut lapangan usaha dari nilai PDRB Provinsi Bali selengkapnya sebagaimana disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2014,
Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014

Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)		Tahun 2014		
	2013	2014	2013	2014	Laju Pertum- buan (%)	Distri- busi (%)	Sumber Pertum- buan (%)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)							
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	20,45	22,90	17,34	18,16	4,73	14,64	0,72
B. Pertambangan dan Penggalian	1,76	1,96	1,56	1,55	-0,60	1,25	-0,01
C. Industri Pengolahan	8,66	9,98	7,57	8,24	8,88	6,38	0,59
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,23	0,25	0,26	2,64	0,14	0,01
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,26	0,29	0,26	0,28	7,40	0,18	0,02
F. Konstruksi	13,26	14,11	11,24	11,44	1,80	9,02	0,18
G. Perdag. Besar&Eceran, Reparasi Mobil&Spd.Motor	11,17	12,94	9,96	10,69	7,27	8,27	0,63
H. Transportasi dan Pergudangan	11,31	14,20	8,51	9,00	5,71	9,08	0,43
I. Akomodasi dan Makan Minum	28,94	36,11	22,28	23,74	6,53	23,08	1,27
J. Informasi dan Komunikasi	7,31	8,03	7,33	7,85	7,21	5,14	0,46
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5,77	6,65	4,78	5,23	9,49	4,25	0,40
L. Real Estate	5,97	6,81	5,41	5,89	8,89	4,35	0,42
M,N. Jasa Perusahaan	1,34	1,53	1,22	1,31	7,49	0,98	0,08
O. Adm. Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial	6,85	7,83	6,61	7,32	10,75	5,00	0,62
P. Jasa Pendidikan	6,48	7,47	5,69	6,29	10,58	4,77	0,53
Q. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	2,67	3,09	2,37	2,67	12,43	1,98	0,26
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2,02	2,32	1,73	1,86	7,63	1,48	0,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	134,40	156,45	114,11	121,78	6,72	100,00	6,72

Sumber : BPS Provinsi Bali

Disamping sejumlah faktor pendorong diatas, daya beli masyarakat juga masih cukup baik sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada sisi pemerintah, berbagai stimulus yang telah diberikan melalui berbagai program maupun pembangunan fisik ikut membawa ekonomi Bali dan investasi swasta turut pula berperan serta dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi bali. Perbankan sebagai lembaga intermediasi juga menunjukkan peningkatan kinerja sehingga



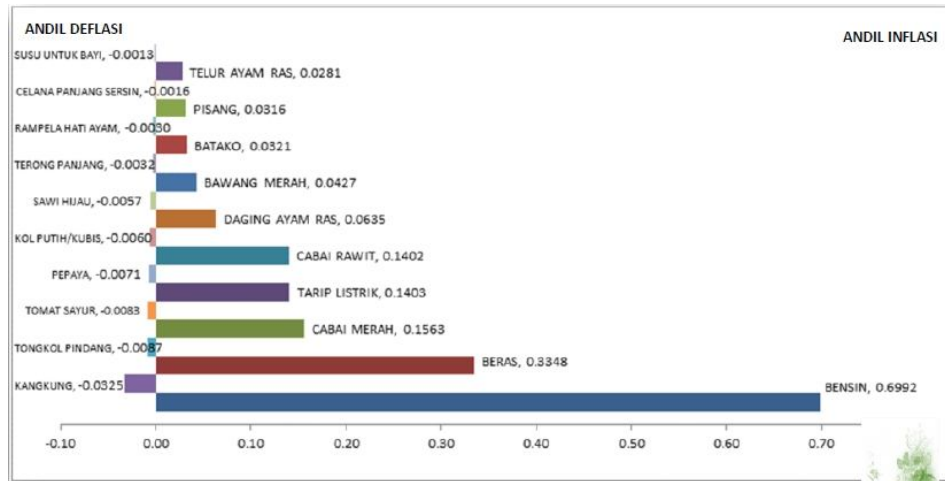
perputaran ekonomi di Bali bisa berjalan dengan lebih optimal. Adapun pertumbuhan dan distribusi menurut nilai PDRB Provinsi Bali menurut komponen pengeluaran selengkapnya sebagaimana tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2
Nilai PDRB Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2013 - 2014,
Laju Pertumbuhan, Distribusi dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2014

Jenis Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)		Tahun 2014		
	2013	2014	2013	2014	Laju Pertum- buhan	Distri- busi	Sumber Pertum- buhan
					(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69,65	76,48	60,79	64,03	5,33	48,88	2,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,72	1,97	1,48	1,50	1,24	1,26	0,02
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	16,63	16,23	13,30	12,32	-7,36	10,37	-0,86
4. Pembentukan Modal tetap Bruto	44,91	48,55	38,11	38,80	1,81	31,03	0,60
5. Perubahan Inventori	1,56	1,36	0,88	0,75	-15,16	0,87	-0,12
6. Ekspor Barang dan Jasa	43,81	56,46	37,07	44,29	19,49	36,09	6,33
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	9,90	12,61	8,06	9,32	15,63	8,06	1,10
8. Net Ekspor Antar Daerah	-33,99	-31,97	-29,47	-30,61	3,84	-20,43	-0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	134,40	156,45	114,11	121,78	6,72	100,00	6,72

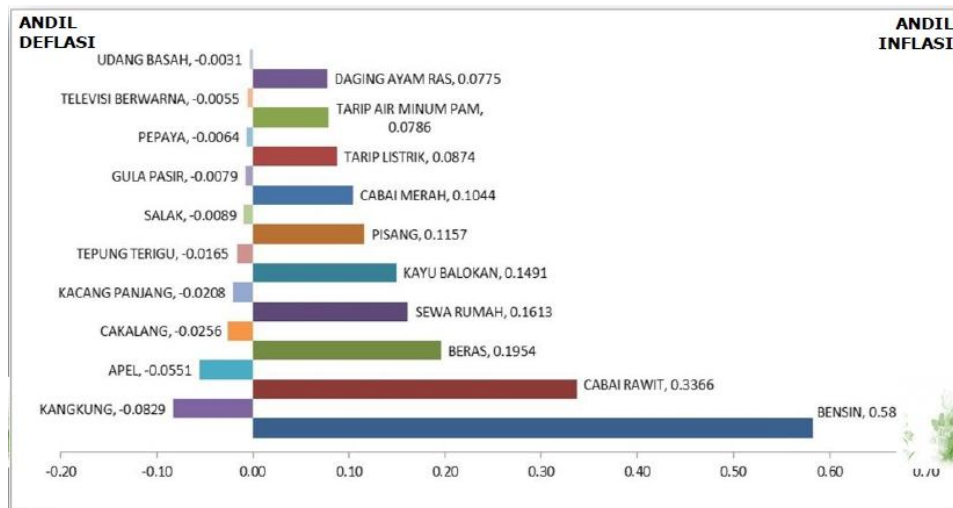
Sumber : BPS Provinsi Bali

Dari sisi Inflasi, Bali yang dalam hal ini diwakili oleh Kota Denpasar dan Singaraja di Tahun 2014 mencapai 8,03 persen. Selama tahun 2014, inflasi di Bali mengalami fluktuasi, tinggi di awal dan akhir tahun. Jika digambarkan grafik, maka angka inflasi Bali di tahun ini menyerupai grafik U terbalik. Di awal tahun, Bali mengalami inflasi sebesar 1,26 persen kemudian beranjak turun hingga sempat mengalami deflasi di Bulan Juni yakni sebesar -0,2 persen. Inflasi tertinggi selama tahun 2014 terjadi pada Bulan Desember yakni mencapai 1,99 persen. Tinggi nya inflasi di Bulan Desember ini merupakan imbas dari kebijakan pencabutan subsidi oleh Pemerintah. Selain kebijakan tersebut, komoditas penyebab inflasi di Bulan Desember adalah kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti Beras, Cabai Merah, Cabai Rawit. TDL juga merupakan salah satu komoditas penyumbang inflasi yang cukup besar di penghujung akhir tahun 2014 ini.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 3.4
Andil Komoditas yang Mendorong Inflasi Desember
di Kota Denpasar pada Tahun 2014



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 3.5
Andil Komoditas yang Mendorong Inflasi Desember
di Kota Singaraja pada Tahun 2014

Dengan total nilai PDRB mencapai sebesar Rp.156,45 Trilyun dan jumlah penduduk mencapai sebanyak 4,104 juta jiwa, maka berdasarkan tahun dasar 2010 PDRB per kapita Bali pada tahun 2014 telah mencapai Rp.38,12 juta/tahun. Angka ini meningkat sebesar 15,03 persen dibanding tahun 2013 dimana PDRB per kapita baru mencapai Rp.33,13 juta/tahun.



Tabel 3.3.
Total PDRB, Jumlah Penduduk dan PDRB Per Kapita di Provinsi Bali
Tahun 2013-2014

Uraian		2013	2014
(1)		(2)	(3)
Produk Domestik Regional Bruto (Triliun Rupiah)			
	Atas Dasar Harga Berlaku (2000=100)	94,56	106,25
	Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100)	134,40	156,45
Penduduk (Ribuan jiwa)*		4.056,30	4.104,90
PDRB Per Kapita (Juta rupiah/tahun)			
	Atas Dasar Harga Berlaku (2000=100)	23,31	25,88
	Atas Dasar Harga Berlaku (2010=100)	33,13	38,11

Catatan: *) Hasil Proyeksi Penduduk

Sumber: BPS Provinsi Bali

3.1.2 Prospek Perekonomian Bali Tahun 2015

Memperhatikan kondisi perekonomian Bali tahun 2014, maka perkiraan kondisi ekonomi Bali pada tahun 2015 sebagaimana berikut :

Tabel 3.4.
Target Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2015

No.	URAIAN	TARGET TAHUN 2015
(1)	(2)	(3)
1	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	
	a. Range	6,44 - 7,13
	b. Moderat	6,79
2.1	EKONOMI BALI (2000=100)	
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- Milyar	122.219,98
	b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)- Milyar	82.504,08
2.2	EKONOMI BALI (2010=100)	
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- Milyar	192.639,31
	b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)- Milyar	130.040,35
3	PER KAPITA (juta rupiah/tahun)	46,39



4	DISTRIBUSI (%)	
	- Pendekatan Produksi	
	1. Pertanian	14,19
	2. Industri Pengolahan	9,68
	3. Konstruksi	4,98
	4. Pariwisata (PHR, Angkutan, Bank, dan Jasa)	68,49
	5. Lainnya (pertambangan dan LGA)	2,66
	- Pendekatan Pengeluaran	
	1. Konsumsi Rumah tangga	49,22
	2. Konsumsi Pemerintah	10,67
	3. Investasi	32,71
	4. Net Ekspor	7,40
5	Inflasi (± 1)	4,87
6	KEMISKINAN (Posisi September)	
	a. Jumlah Penduduk (Ribuan orang)	157,71 - 160,97
	b. Persentase (%)	3,78 - 3,86
7	KETENAGAKERJAAN (Posisi Agustus)	
	a. Jumlah Angkatan Kerja (Juta orang)	2,49 - 2,51
	b. Jumlah Pengangguran (Ribuan orang)	46,14 - 47,74
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT (%)	1,85 - 1,90
8	KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)	0,3401
9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	75,06

Sumber: Hasil Penghitungan Tim Makro Ekonomi Bali

Perekonomian Bali tahun 2015 diperkirakan akan tumbuh sebesar 6,79 (6,44 – 7,13) persen. Total PDRB ditargetkan sebesar Rp. 192,64 Trilyun. Nilai investasi sendiri diperkirakan akan mencapai sebesar 32,71 trilyun terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta/rumah tangga. Sementara inflasi ditargetkan dibawah 5 persen.

Sebagaimana struktur ekonomi tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015 struktur perekonomian Bali masih akan didominasi dan bertumpu pada sektor tersier. Untuk itu kondisi pariwisata sebagai salah satu pendukung sektor tersier diharapkan akan semakin baik dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas kunjungan Wisman dan Wisnus yang datang ke Bali. Pada tahun 2015 kunjungan Wisman diperkirakan sebanyak 3,30 – 3,50 juta orang, dengan lama tinggal 12 - 14 hari dan rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp. 1,9 juta – Rp. 2,2



juta. Sedangkan kunjungan Wisnus diperkirakan mencapai 4,5 – 4,7 juta orang, dengan lama tinggal mencapai 5–6 hari dan rata-rata pengeluaran per hari sebesar Rp. 0,54 juta – Rp. 0,75 juta.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang sebesar 6,79 persen tersebut, maka PDRB per kapita penduduk bali diperkirakan bisa mencapai sebesar 46,39 juta/tahun. Dengan demikian kondisi kemiskinan di Provinsi Bali pada tahun 2015 diperkirakan bisa berada dibawah 4 persen dan tingkat pengangguran terbuka diperkirakan tetap berada dibawah 2 persen.

3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Bali Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tantangan dan prospek perekonomian Bali, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan Provinsi Bali sendiri.

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2016-2017 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Bali diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Target Makro Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2017

No.	URAIAN	TARGET TAHUN 2016	TARGET TAHUN 2017
(1)	(2)	(3)	(3)
1	PERTUMBUHAN EKONOMI (%)		
	a. Range	6,83 - 7,56	7,29 - 8,07
	b. Moderat	7,20	7,68
2.1	EKONOMI BALI (2000=100)		
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- Milyar	137.664,42	155.386,99
	b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)- Milyar	93.831,09	106.973,49



2.2	EKONOMI BALI (2010=100)		
	a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)- Milyar	204.523,98	218.034,68
	b. Produk Domestik Regional Neto (PDRN)- Milyar	139.402,09	150.102,22
3	PER KAPITA (juta rupiah/tahun)	48,70	51,34
4	DISTRIBUSI (%)		
	- Pendekatan Produksi		
	1. Pertanian	13,42	12,67
	2. Industri Pengolahan	9,91	10,22
	3. Konstruksi	4,92	4,87
	4. Pariwisata (PHR, Angkutan, Bank, dan Jasa)	69,14	69,66
	5. Lainnya (pertambangan dan LGA)	2,61	2,57
	- Pendekatan Pengeluaran		
	1. Konsumsi Rumah tangga	48,33	47,34
	2. Konsumsi Pemerintah	11,15	11,53
	3. Investasi	33,51	34,13
	4. Net Ekspor	7,01	7,00
5	Inflasi (\pm 1)	4,77	4,62
6	KEMISKINAN (Posisi September)		
	a. Jumlah Penduduk (Ribu orang)	157,8 - 161,06	157,83 - 161,09
	b. Persentase (%)	3,75 - 3,83	3,71 - 3,79
7	KETENAGAKERJAAN (Posisi Agustus)		
	a. Jumlah Angkatan Kerja (Juta orang)	2,55 - 2,58	2,62 - 2,64
	b. Jumlah Pengangguran (Ribu orang)	45,25 - 46,87	43,68 - 45,31
	c. Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT (%)	1,77 - 1,82	1,67 - 1,71
8	KETIMPANGAN PENDAPATAN (GINI RATIO)	0,3177	0,2940
9	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	75,54	76,01

Sumber: Hasil Penghitungan Tim Makro Ekonomi Bali

Laju pertumbuhan ekonomi Bali diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6,83 - 7,56 persen untuk tahun 2016 dan 7,29 - 8,07 persen pada tahun 2017. Sementara PDRB per kapita untuk tahun 2016 diprediksikan sebesar Rp. 48,70 juta/tahun dan menjadi sebesar



Rp. 51,34 juta/tahun pada tahun 2017. Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2016, tingkat kemiskinan di Provinsi Bali ditargetkan akan berada pada kisaran 3,75 - 3,83 persen pada tahun 2016 dan sekitar 3,71 - 3,79 persen pada tahun 2017. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2016 TPT akan berada pada kisaran 1,77 - 1,82 persen dan tahun 2017 sekitar 1,67 - 1,71 persen.

Secara sektoral, sektor tersier diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Bali pada periode tahun 2016-2017, namun demikian sektor sekunder dan sektor primer diperkirakan akan tetap memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian bali. Dari sisi permintaan, konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif, investasi yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil serta investasi pemerintah yang lebih ekspansif diperkirakan menjadi komponen-komponen yang akan membantu mempertahankan kinerja perekonomian Bali tetap stabil.

Tekanan inflasi pada tahun 2016 dan 2017 diperkirakan semakin mereda, kondisi ini seiring dengan telah berakhirnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, tekanan inflasi diperkirakan muncul dari berbagai pengaruh seperti faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian.

Analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Provinsi Bali Tahun 2016-2017 sebagaimana terlihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6.
SWOT Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2016-2017

VARIABEL	SUB VARIABEL
KEKUATAN	1. Memiliki budaya dan tradisi yang menarik 2. Memiliki alam yang subur 3. Infrastruktur meningkat (kualitas dan kuantitas) 4. Memiliki potensi pesisir pantai dan laut yang luas 5. Keamanan yang kondusif
KELEMAHAN	1. Perubahan cuaca akan berdampak pada produksi

VARIABEL	SUB VARIABEL
	<ol style="list-style-type: none">2. Adanya ketimpangan pendapatan yang cukup besar antar kab./kota3. Kemacetan lalu lintas pada kawasan perkotaan dan kawasan pariwisata4. Padatnya penduduk akibat adanya kecenderungan migrasi antar provinsi ke Bali
PELUANG	<ol style="list-style-type: none">1. Minat investor untuk melakukan investasi di Bali sangat tinggi2. Ekspektasi positif pelaku usaha dan konsumen positif terhadap perekonomian Bali ke depan3. Memiliki akses transportasi yang mudah baik laut, udara maupun darat
TANTANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Masih terdapat kantong-kantong kemiskinan, sehingga program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus masih menjadi prioritas.2. Ketidakseimbangan pembangunan bali selatan dengan bali utara, timur dan barat3. Tantangan perubahan iklim dan alih fungsi lahan, dikhawatirkan akan menurunkan produksi pangan Bali pada beberapa tahun ke depan.4. Penciptaan keterkaitan sektor pariwisata dengan sektor lainnya seperti pertanian.5. Persaingan perdagangan dan jasa industri kreatif nasional dan internasional6. Penduduk Bali yang heterogen sebagai tantangan dalam mempertahankan kebudayaan7. Pembangunan kualitas SDM dalam menghadapi MEA8. Rendahnya pemanfaatan angkutan umum

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Provinsi Bali mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut. Adapun prospek perekonomian Bali tersebut, yaitu :

Tabel 3.7.
Prospek Perekonomian Bali Tahun 2016-2017

No	Bidang/Fenomena	Uraian
1	Pariwisata	Bali memiliki alam, budaya serta tradisi yang menarik sebagai modal dalam pengembangan kepariwisataan di Provinsi Bali.
2	Industri Kreatif	Bali memiliki cukup banyak usaha ekonomi kreatif baik skala besar, menengah, kecil dan mikro.
3	Pertanian dalam arti luas	Meskipun lahan pertanian tidak terlalu, tetapi sektor pertanian Bali memiliki komoditas unggulan yang cukup beragam seperti buah-buahan lokal yang memiliki kualitas yang baik. Disamping itu sektor pertanian ini bisa disinkronisasikan dengan sektor pariwisata seperti menjadi Agro Wisata.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Bali ke depan, maka pada tahun 2016 diperlukan kerangka perekonomian Bali sebagai berikut:

1. Perlu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relative rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Bali tahun 2016.
3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk.
4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif.
5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan system perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).
6. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

7. Peningkatan daya saing tenaga kerja Bali dalam rangka menghadapi MEA.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah



dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok dan Pemanfaatan Air Permukaan.
 - b. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta, dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan dari Kerjasama Penyelenggaraan Diklat, Pemakaian Barang Milik Daerah, Lain-lain, dan Pendapatan Usaha BLUD.
2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
 - a. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil, dari sebagian penerimaan perpajakan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi, bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a. Hibah, terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah, Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif, PT Sarihusada dan PT. Jasa Raharja.
 - b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

Peningkatan pendapatan daerah diupayakan melalui sumber-sumber pendapatan daerah baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan yang sah. Adapun kebijakan yang dapat ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dilakukan melalui :

Dalam rangka meningkatkan PAD diupayakan melalui kebijakan penataan peraturan daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah; intensifikasi; dan ekstensifikasi yaitu sebagai berikut :

- a. Penataan Peraturan Daerah di bidang Pendapatan Asli Daerah
Dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (d/h/ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan



Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah) yaitu :

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan

b. Kebijakan intensifikasi dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti :

- ✓ Menata, mengkaji dan memperbaharui kebijakan yang dijadikan dasar hukum pemungutan Pendapatan Asli Daerah;
- ✓ Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya;
- ✓ Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pelatihan fungsional dan bimbingan teknis (bimtek);
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait melalui Rapat Kerja Tim Pembina Samsat Provinsi Bali dengan pelaksana Samsat di seluruh Bali
- ✓ Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui SAMSAT ONLINE

c. Kebijakan ekstensifikasi, dilakukan dengan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai berikut :

- ✓ Mengadakan penjajagan dan pendataan obyek yang akan diangkat;
- ✓ Membuat kajian-kajian terkait pengembangan potensi obyek pajak dan obyek lainnya;
- ✓ Mengadakan konsultasi khususnya mengenai potensi komponen-komponen PAD yang bisa dikembangkan; dan
- ✓ Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka menggali sumber-sumber PAD.

d. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.



2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah

Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Sedangkan peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah. Salah satu langkah yang dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi adalah dengan melauai peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota dalam mengoptimalkan bagi hasil dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Proyeksi/Target Tahun 2015	Proyeksi/Target Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	3.249.750.720.781,00	3.396.555.781.139,47	3.958.173.007.551,40	4.608.608.717.976,00	5.090.550.425.989,00
1.1	Pendapatan asli daerah	1.751.375.903.175,00	1.930.000.000.000,00	2.303.812.232.500,00	2.840.927.951.000,00	3.350.000.000.000,00
1.1.1	Pajak Daerah	1.595.931.327.150,00	1.751.569.720.009,00	2.104.381.047.450,00	2.583.385.032.710,00	3.024.937.180.071,17
1.1.2	Retribusi Daerah	34.144.911.470,00	48.130.558.024,00	35.031.026.800,00	37.393.205.200,00	47.139.462.500,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah Yang dipisahkan	73.250.204.555,00	79.211.276.967,00	74.476.425.450,00	87.040.109.590,00	107.653.904.028,83
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48.049.460.000,00	51.088.445.000,00	89.923.732.800,00	133.109.603.500,00	170.269.453.400,00
1.2	Dana Perimbangan	852.217.764.758,00	785.656.050.820,00	1.065.533.025.051,40	1.025.947.166.976,00	998.765.907.000,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ bagi hasil bukan pajak	124.112.774.758,00	91.576.970.820,00	191.634.802.051,40	149.853.188.976,00	167.168.939.000,00
1.2.2	Dana alokasi umum	694.079.080.000,00	694.079.080.000,00	832.297.473.000,00	831.597.268.000,00	831.597.268.000,00
1.2.3	Dana Alokasi khusus	34.025.910.000,00	-	41.600.750.000,00	44.496.710.000,00-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	646.157.052.848,00	680.899.730.319,47	588.827.750.000,00	741.733.600.000,00	741.784.518.989,00
1.3.1	Hibah	29.781.565.700,00	30.115.162.000,00	4.316.600.000,00	4.316.600.000,00	4.673.400.000,00
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	139.251.878.000,00	-	-	-	-



No	Uraian	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Proyeksi/Target Tahun 2015	Proyeksi/Target Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	388.639.310.000,00	388.639.310.000,00	391.318.650.000,00	525.647.000.000,00	525.323.000.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya	88.484.299.148,00	262.145.258.319,47	193.192.500.000,00	211.770.000.000,00	211.788.118.989,00
1.3.6	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-
A.	JUMLAH PENDAPATAN	3.249.750.720.781,00	3.396.555.781.139,47	3.958.173.007.551,40	4.608.608.717.976,00	5.090.550.425.989,00

Sumber : APBD 2012, APBD 2013, APBD 2014, Proyeksi APBD Induk 2015, Proyeksi APBD Induk 2016

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistimatis dan terpola. Belanja daerah pada Tahun 2016 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut.. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas

pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, budaya, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
3. Optimalisasi belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
4. Optimalisasi belanja langsung untuk pembangunan infrastruktur publik dilakukan melalui kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga, sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Transparansi dan Akuntabel Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pelaporan dan pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasil.

Klasifikasi belanja menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-masing pemerintah daerah; dan klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Sementara menurut kelompok belanja, belanja dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Belanja Tidak Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari: Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga; dan



2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan, terdiri dari : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal.

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Provinsi Bali Tahun 2012 s/d Tahun 2016

No	Uraian	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Proyeksi/Target Tahun 2014	Proyeksi/Target Tahun 2015	Proyeksi/Target Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH					
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.372.921.201.442,91	2.599.166.083.608,92	3.062.433.702.663,50	3.463.283.972.699,53	3.919.655.241.369,74
2.1.1	Belanja Pegawai	779.639.483.934,40	803.844.750.129,01	904.232.769.911,00	903.501.398.111,53	945.565.000.097,24
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	744.942.852.879,00	872.152.029.400,00	690.470.769.000,00	734.607.912.000,00	954.658.214.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	27.957.760.000,00	29.304.5000.000,00	156.441.220.000,00	159.280.601.000,00	180.459.580.264,95
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa	680.261.434.545,00	634.087.373.759,11	755.723.903.000,00	977.284.566.793,00	1.132.002.748.521,35
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi / Kab/ Kota dan Pemerintahan Desa	106.699.649.000,00	240.777.430.320,80	523.168.603.295,00	648.609.494.795,00	661.969.698.486,20
2.1.8	Belanja Tidak terduga	29.420.021.084,51	15.000.000.000,00	22.396.437.457,50	30.000.000.000,00	35.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.283.712.033.703,00	1.202.358.515.541,00	1.427.233.339.616,40	1.526.181.126.489,54	1.577.338.117.846,40
	JUMLAH BELANJA Daerah	3.656.633.235.145,91	2.599.166.083.608,92	3.062.433.702.663,50	4.989.465.099.189,07	5.496.993.359.216,14

Sumber : APBD 2012, APBD 2013, APBD 2014, Proyeksi APBD Induk 2015, Proyeksi APBD Induk 2016

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan beban. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari.

- 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA) mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan



penerimaan dana perimbangan pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan, dengan Jumlah yang dianggarkan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan. Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.
6. Penerimaan piutang digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah, pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat berupa Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Daerah, Pembayaran Utang Pokok serta Pemberian pinjaman daerah.



1. Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang ditetapkan dengan peraturan daerah, guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Peraturan daerah tersebut mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Dana cadangan dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan; ditempatkan pada rekening tersendiri. Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.
2. Penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Provinsi Bali
Tahun 2012 s/d 2016

No	Uraian	Realisasi Tahun 2012	Realisasi Tahun 2013	Realisasi Tahun 2014	Proyeksi/Target Tahun 2015	Proyeksi/Target Tahun 2016
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan daerah					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SILPA)	372.409.786.364,91	398.478.471.410,45	751.494.034.728,50	580.856.381.213,07	406.442.933.227,14
3.1.2	Pencairan Dana cadangan	84.472.728.000,00	41.490.346.600,00	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberianh pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-
E.	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	456.882.514.364,91	413.900.132.964,91	751.494.034.728,50	580.856.381.213,07	406.442.933.227,14



3.2	Pengeluaran Pembiayaan daerah					
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	50.000.000.000,00	35.000.000.000,00	220.000.000.000,00	200.000.000.000,00-	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.2.5	Penguatan Modal Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
F.	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	35.000.000.000,00	220.000.000.000,00	200.000.000.000,00	-

Sumber : APBD 2012, APBD 2013, APBD 2014, Proyeksi APBD Induk 2015, Proyeksi APBD Induk 2016